

Nama : Indah Nur Aulia

NPM : 2213031047

Studi Kasus Ekonomi Industri

Indonesia sedang menghadapi tantangan deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun meskipun pendapatan per kapita belum mencapai level negara maju. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan *Making Indonesia 4.0* sebagai upaya revitalisasi industri nasional, dengan fokus pada lima sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

Namun, setelah lima tahun implementasi, pertumbuhan sektor-sektor tersebut belum signifikan. Sementara itu, negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh justru menunjukkan peningkatan pesat dalam sektor manufakturnya.

Pertanyaan:

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.

Jawaban:

Implementasi *Making Indonesia 4.0* menghadapi sejumlah kendala yang membuat dampaknya terhadap sektor industri prioritas belum signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya pembangunan kapabilitas industri domestik. Banyak perusahaan belum memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan teknologi untuk mengadopsi komponen inti revolusi industri 4.0 seperti IoT, automasi, big data, atau sistem produksi cerdas. Dalam perspektif teori kebijakan industri, ini menunjukkan adanya *capability failure*, di mana negara terlalu cepat mendorong adopsi teknologi canggih tanpa memastikan kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan struktur industri nasional. Akibatnya, transformasi digital berjalan superficial dan hanya terjadi pada sebagian kecil perusahaan besar yang telah siap.

Selain itu, implementasi kebijakan cenderung terfragmentasi dan tidak terkoordinasi lintas lembaga. *Making Indonesia 4.0* membutuhkan integrasi antara kebijakan industri, pendidikan vokasi, pembangunan infrastruktur, investasi, dan riset. Namun dalam praktiknya, kementerian bergerak dengan agenda masing-masing sehingga menciptakan *policy coordination failure*. Hambatan struktural seperti biaya logistik tinggi, birokrasi perizinan, inkonsistensi regulasi, dan lemahnya ekosistem pemasok lokal semakin memperlambat proses industrialisasi. Dalam konteks ini, kebijakan yang bersifat top-down tidak diiringi mekanisme implementasi yang kuat, sehingga tidak mampu mendorong peningkatan produktivitas sektor makanan-minuman, tekstil, elektronik, otomotif, dan

kimia secara signifikan. Kondisi inilah yang menciptakan stagnasi dan memperburuk risiko *deindustrialisasi dini*.

2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?

Jawaban:

Perbedaan efektivitas kebijakan industri Indonesia menjadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam dan Korea Selatan. Korea Selatan berkembang melalui model *developmental state*, yaitu negara yang aktif membangun kapabilitas industri melalui dukungan pembiayaan, koordinasi kebijakan, dan penetapan target jangka panjang. Negara secara konsisten memfasilitasi transfer teknologi, pembentukan industri domestik, dan investasi besar dalam pendidikan teknik dan riset. Dengan dukungan institusi yang kuat, Korea berhasil mendorong perusahaan-perusahaan seperti Hyundai, Samsung, dan LG menjadi pemain global dalam rantai nilai dunia.

Berbeda dengan Korea, Vietnam mengadopsi strategi industrialisasi berbasis FDI (Foreign Direct Investment). Mereka menciptakan zona industri dan kawasan ekonomi khusus yang efisien, menyediakan insentif fiskal menarik, serta memastikan kepastian regulasi bagi investor. Strategi ini memudahkan Vietnam masuk ke rantai pasok global, terutama dalam elektronik, tekstil, dan perakitan. Biaya tenaga kerja rendah, infrastruktur kawasan industri yang terfokus, serta prosedur investasi yang sederhana meningkatkan daya tarik Vietnam di mata perusahaan global.

Jika dibandingkan, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Implementasi kebijakan industri kurang konsisten, koordinasi antar lembaga tidak solid, dan iklim investasi masih dibayangi berbagai hambatan. Infrastruktur industri belum teralokasi secara optimal, biaya logistik jauh lebih tinggi, dan sistem pendidikan vokasi belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri. Sementara Vietnam bergerak cepat melalui kebijakan pro-FDI, Indonesia masih tertahan oleh birokrasi dan keterbatasan kapabilitas domestik. Dan jika dibandingkan dengan Korea Selatan, Indonesia belum mengembangkan strategi jangka panjang yang kuat untuk membangun kapabilitas industri nasional dari hulu ke hilir.

3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawaban:

Untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan deindustrialisasi dini, diperlukan rancangan kebijakan industri yang lebih kontekstual, bertahap, dan terintegrasi. Kebijakan industri baru harus menjadikan pembangunan kapabilitas domestik sebagai fondasi utama. Ini berarti pemerintah harus memperkuat pendidikan vokasi, memfasilitasi transfer teknologi, dan meningkatkan kualitas riset serta inovasi. Program vokasi yang terintegrasi

dengan kebutuhan industri perlu diperluas, sementara pusat pelatihan teknologi dan *Center of Excellence Industry 4.0* harus dibangun di wilayah klaster industri untuk mengurangi kesenjangan sumber daya manusia.

Selain itu, kebijakan industri harus bergerak menuju *selective and conditional industrial policy*. Artinya, insentif fiskal tidak diberikan secara luas, tetapi difokuskan pada sektor prioritas dengan syarat tertentu seperti peningkatan *local content*, pembentukan kemitraan dengan pemasok lokal, atau investasi dalam R&D domestik. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mendorong perusahaan berperan dalam pembangunan ekosistem industri, bukan sekadar memanfaatkan insentif tanpa kontribusi jangka panjang. Kebijakan alternatif juga perlu mengembangkan *place-based industrial clusters* agar industri tidak tersebar dan kehilangan skala ekonomi. Klaster di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dan Batam, misalnya, dapat difokuskan pada sektor tertentu seperti tekstil, otomotif, elektronik, dan makanan-minuman. Pemerintah juga perlu menciptakan sistem pembiayaan industri yang lebih fleksibel, seperti dana upgrading teknologi, kredit berbunga rendah, dan program *matching grants* bagi UMKM industri.

Dalam jangka panjang, kebijakan industri harus diarahkan pada integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global bernilai tambah tinggi. Pemerintah perlu menargetkan segmen yang lebih kompleks, seperti komponen elektronik, desain produk, atau riset bahan kimia, sehingga industri nasional tidak hanya berperan sebagai perakit. Dengan kombinasi kapabilitas manusia, koordinasi kebijakan yang kuat, penguatan ekosistem industri, dan insentif berbasis kinerja, Indonesia dapat membalik tren deindustrialisasi dan membangun basis manufaktur yang kompetitif serta berkelanjutan.